



SIARAN PERS
BADAN RESTORASI GAMBUT REPUBLIK INDONESIA
No: SIPRES/BRG/25/09/2019

Dapat disiarkan segera

BRG Periksa Sekat Kanal dan Sumur Bor untuk Optimalisasi Pembasahan Gambut

Jakarta, 9 September 2019 – Badan Restorasi Gambut (BRG) tengah memeriksa seluruh sumur bor dan fasilitas infrastruktur pembasahan gambut (IPG) lainnya yang digunakan untuk pembasahan gambut dan penanganan kebakaran di lahan gambut. BRG ingin memastikan IPG yang dibangun sejak 2017 bisa berfungsi saat musim kemarau terjadi. “Saat ini kita sedang cek seluruh fasilitasnya, tanpa terkecuali,” tegas Nazir Foead dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (9/9).

Hal tersebut dikatakan Nazir menanggapi pemberitaan media yang menyebutkan adanya sumur bor fiktif di Desa Henda, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Terkait dugaan sumur fiktif tersebut, Nazir menyebutkan, dirinya menyesalkan jika benar demikian. Karena itu, tegasnya, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat dalam proses pembangunan maupun pemeliharaan sumur bor dan infrastruktur pembasahan gambut lain ke depannya. Nazir menyebutkan, BRG berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan restorasi gambut. “Setiap tahun kami diaudit Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengenai laporan keuangan BRG. Kami pun juga mendapat arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa menjalankan kebijakan anti korupsi.”

Pembangunan sekat kanal dan sumur bor dilakukan tidak hanya oleh BRG tetapi juga oleh pemerintah daerah, lembaga mitra pembangunan dan LSM serta perusahaan. Pada 2017, pembangunan IPG dengan dana APBN dilakukan BRG bermitra dengan perguruan tinggi setempat dan kelompok masyarakat. Sementara pada 2018 kegiatan dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada OPD lingkungan hidup atau kehutanan di provinsi-provinsi prioritas restorasi gambut. Dalam pelaksanaannya, OPD bekerja dengan berbagai mitra seperti perguruan tinggi, pokmas atau pihak ketiga.

Pemeriksaan terhadap sekat kanal dan sumur bor saat ini dilakukan oleh BRG secara bertahap. “Sekarang kami baru merampungkan pemeriksaan pada IPG yang ada di kawasan konservasi di Riau dan Jambi. Seluruhnya sudah kami cek baik keberadaan ataupun kualitasnya”, tambah Kepala BRG. Mengingat jumlah IPG yang dibangun sangat banyak, ribuan unit, maka pemeriksaan memerlukan waktu. Di Kalimantan Tengah, pemeriksaan sudah dimulai awal pekan lalu dan terus berlangsung hingga saat ini. Terhadap dugaan pembangunan sumur bor fiktif tersebut juga sedang dilakukan investigasi oleh BRG.

Restorasi gambut memerlukan dukungan partisipasi dan pengawasan masyarakat yang baik. BRG berterima kasih pada kepedulian semua pihak untuk menjaga tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan restorasi gambut.

---selesai---



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Myrna Safitri

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
Badan Restorasi Gambut
Republik Indonesia
myrna.safitri@brg.go.id
+62816861372

Tentang Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan dengan daerah kerja adalah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi pula situs Badan Restorasi Gambut di brg.go.id